

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk membiayai pembangunan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Negara memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar dan salah satu sumber dananya adalah dari penerimaan pajak.

Pajak yang dipungut dari warga Negara Indonesia adalah salah satu kewajiban yang penagihannya dapat dipaksakan. Berdasarkan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka suatu reformasi perpajakan telah dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertujuan agar para wajib pajak lebih patuh untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga jangan sampai terkena sanksi karena tidak membayar pajak. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan berbagai upaya termasuk memberikan sosialisasi kepada pribadi atau perusahaan sebagai wajib pajak mengenai manfaat dan sanksi terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Di lain pihak, pribadi atau masyarakat selaku wajib pajak diharapkan menyadari manfaat dan sanksi kepatuhan pembayaran pajak, untuk itu dituntut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan

perpajakan, karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak perdata maupun pidana.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, PT Provinces Indonesia sebagai salah satu anak Bakrie Group yang mendapat tugas dari Holding Company Bakrie Group untuk mengelola penyewaan beberapa propertynya, dituntut untuk melakukan fungsinya dengan baik termasuk pengelolaan pajaknya. Untuk itu, PT Provinces Indonesia perlu menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul "Perlakuan Akuntansi Atas Pemungutan PPh Pasal 23 Terhadap Tenant Sebagai Wapu Dalam Upaya Memenuhi Kepatuhan Ketentuan Perpajakan (Studi Kasus pada PT Provinces Indonesia).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Jatar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara menghitung serta perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh Pasa123 terhadap tenant sebagai Wapu?
- b. Apakah perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 sebagai Wapu tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

- a. Untuk menganalisis perhitungan serta perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 sebagai Wapu terhadap Tenant oleh PT Provinces Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pemenuhan ketentuan perpajakan dalam hubungannya dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 tersebut sebagai Wapu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan, kemampuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan khususnya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.
- c. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan kajian perlakuan akuntansi

atas pemungutan PPh pasal 23 terhadap Tenant sebagai Wapu dalam upaya memenuhi kepatuhan ketentuan perpajakan.

